

Plt Kadis Pendidikan La Mane Fokus Benahi Pendidikan Baubau Lewat Konsolidasi Internal Susun Strategi Pendidikan Adaptif Teknologi

-  Konsolidasi internal untuk satukan visi dan pemahaman jajaran
-  Fokus tingkatkan kualitas layanan dan mutu pembelajaran di sekolah
-  Dorong pemanfaatan teknologi seperti papan interaktif dan perangkat digital
-  Pendampingan guru senior untuk tingkatkan literasi digital
-  Perkuat sinergi sekolah dan dinas sebagai satu kesatuan sistem



Langkah pertama adalah membangun konsolidasi agar seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama dalam menerjemahkan visi daerah, khususnya kata kunci 'cerdas' dalam pembangunan pendidikan."

LA MANE
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Baubau

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau menegaskan langkah awal kepemimpinan barunya dengan melakukan konsolidasi internal sebagai upaya memperkuat arah kebijakan pendidikan di daerah. Kebijakan ini dilakukan untuk menyatukan persepsi seluruh jajaran dalam menerjemahkan visi Pemerintah Kota Baubau di sektor pendidikan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, La Mane, menyampaikan bahwa konsolidasi menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh program berjalan searah dengan tujuan pembangunan

daerah. Ia menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

"Langkah pertama adalah membangun konsolidasi agar seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama dalam menerjemahkan visi daerah, khususnya kata kunci 'cerdas' dalam pembangunan pendidikan," ujar La Mane, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, salah satu fokus utama adalah mewujudkan Kota Baubau sebagai kota budaya yang cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pendidikan harus berbasis pada penguatan layanan dan mutu pembelajaran di sekolah.

Selain konsolidasi, Dinas Pendidikan juga menyoroti peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam menghadapi perkembangan teknologi. La Mane mengakui bahwa transformasi digital telah mengubah pola pembelajaran secara signifikan, termasuk di Indonesia sejak masa percepatan pembelajaran daring pada pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 yang juga dialami berbagai negara.

Lanjut ke Hal: 7

STAI YPIQ Baubau Buka PMB 2026/2027, Tiga Prodi Jadi Andalan, Siapkan Beasiswa dan Fasilitas Perkuliahannya, SPP Bisa Dicicil



Laporan: Firman

BAUBAU, BP- Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau resmi membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026/2027 yang di-

umumkan sejak pertengahan Juni 2026. Pendaftaran dibuka hingga 29 Agustus 2026 dan menjadi bagian dari upaya kampus dalam memperluas akses pendidikan tinggi berbasis nilai-nilai

Islam di Kota Baubau. Pembukaan PMB ini hadir di tengah meningkatnya tren global pendidikan tinggi berbasis keagamaan yang juga berkembang di berbagai negara, ter-

Lanjut ke Hal: 7

Kesbangpol Buton Selatan Jemput Bola Cari Talenta Hingga ke Pelosok Untuk Paskibraka HUT RI ke 81



Kepala Kesbangpol Buton Selatan, La Makiki,

Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mulai memantapkan persiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17

Agustus 2026. Selain menyiapkan pelatihan dan pemondokan, pemerintah daerah juga menargetkan lahirnya generasi muda yang mampu menjadi kader kepemimpinan dan pelatih Paskibraka di tingkat kecamatan.

Kepala Kesbangpol Buton Selatan, La Makiki, mengatakan

Lanjut ke Hal: 7

Bapenda Buton Selatan Optimistis Penerimaan PBB Meningkat, Data Objek Pajak Akan Disinkronkan dengan BPN



Kepala Bapenda Kabupaten Buton Selatan
Drs. Meizat Amril Tamim, M.Si

Laporan: Firman

BUTIN SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus berupaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan

sinkronisasi data objek pajak dengan data pertanahan milik Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buton Selatan, Drs. Meizat Amril Tamim, M.Si., mengungkapkan bahwa sejak Kabupaten Buton Selatan berdiri, tarif PBB-P2

Lanjut ke Hal: 7

Polres Baubau Pisahkan Penanganan Dua Kasus Asmar, Satu Sebagai Korban dan Satunya Lagi Sebagai Tersangka



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Baubau menegaskan bahwa terdapat dua perkara hukum berbeda yang melibatkan Asmar, yakni sebagai

korban dalam kasus pembacokan dan sebagai tersangka dalam perkara penganiayaan menggunakan senjata tajam.

Kanit I Satreskrim Polres Baubau, Ipda M. Fatih Zhafran,

Lanjut ke Hal: 7

Plt Kadis Pendidikan La Mane Fokus Benahi Pendidikan Baubau Lewat Konsolidasi Internal Susun Strategi Pendidikan Adaptif Teknologi

negara di dunia sebagai tonggak digitalisasi pendidikan global.

"Guru harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Kami terus mendorong pemanfaatan perangkat pembelajaran digital seperti papan interaktif agar proses belajar lebih efektif," kata La Mane.

Ia juga menyoroti perlunya pendampin-

gan bagi guru senior dalam penguasaan teknologi pembelajaran. Kondisi ini menjadi perhatian khusus mengingat tidak semua tenaga pendidik memiliki tingkat literasi digital yang sama, sehingga diperlukan program penguatan kapasitas secara berkelanjutan.

Selain aspek teknologi, Disdikbud Baubau

juga memperkuat sinergi antara dinas dan satuan pendidikan. La Mane menegaskan bahwa sekolah dan dinas tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus menjadi satu sistem yang terintegrasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

"Sekolah dan Dinas Pendidikan adalah

satu kesatuan. Dinas merumuskan kebijakan, sementara sekolah menjadi pelaksana di lapangan," tegasnya. Ia menambahkan bahwa ke depan akan dirumuskan program strategis yang selaras dengan visi pembangunan daerah untuk mencetak generasi yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing. (*)

Kesbangpol Buton Selatan Jemput Bola Cari Talenta Hingga ke Pelosok Untuk Paskibraka HUT RI ke 81

upaya pemerataan keterwakilan peserta menjadi salah satu fokus utama dalam proses seleksi tahun ini. Karena itu, tim seleksi menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Siompu dan Siompu Barat, guna memastikan siswa berprestasi memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi.

"Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan putra-putri terbaik daerah mendapat kesempatan yang sama mengikuti seleksi Paskibraka," ujar La Makiki saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026).

Dari hasil seleksi yang telah diumumkan pekan lalu, sebanyak 72 siswa SMA sederajat dari berbagai kecamatan dinyatakan lolos sebagai calon anggota Paskibraka Kabupaten Buton Selatan. Para peserta berasal dari wilayah Batauga, Sampolawa, Lapandewa, Siompu, Siompu Barat dan sejumlah kecamatan lainnya. Namun, hingga tahun ini belum terdapat peserta dari Kecamatan Batu Atas karena kendala transportasi serta faktor geografis yang cukup menantang.

Kesbangpol juga telah menyelesaikan pengukuran seragam dan menyiapkan fasilitas pemondokan bagi peserta yang berasal dari wilayah jauh. Sekitar 20 peserta dijadwalkan mengikuti program pemondokan menjelang pelaksanaan latihan intensif yang akan berlangsung selama kurang lebih 15 hari sebelum upacara kemerdekaan.

"Seluruh kebutuhan peserta selama pemondokan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari konsumsi, tempat tinggal hingga perlengkapan latihan," kata La Makiki.

Selain pembinaan di tingkat kabu-

paten, Buton Selatan juga mencatat capaian pada seleksi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari tiga peserta yang diutus mengikuti seleksi provinsi, satu orang siswa dari SMA Negeri Lawele berhasil lolos dan akan mewakili daerah pada ajang Paskibraka tingkat provinsi.

Menurut La Makiki, sebelum memasuki masa karantina dan pelatihan, para peserta akan diterima secara resmi oleh pemerintah daerah. "Rencananya akan ada penerimaan resmi sebelum mereka masuk pemondokan dan menjalani latihan intensif sebagai bentuk apresiasi dan motivasi," ujarnya.

Secara historis, program Paskibraka memiliki peran penting dalam pembinaan karakter generasi muda Indonesia sejak pertama kali dibentuk secara nasional pada 1967 atas gagasan Brigjen TNI (Purn) H. Idik Sulaeman. Sejak itu, Paskibraka berkembang menjadi salah satu wadah kaderisasi kepemimpinan, nasionalisme, disiplin, dan wawasan kebangsaan bagi pelajar di seluruh Indonesia. Di berbagai negara, pembinaan generasi muda melalui organisasi semi-seremonial dan kepemimpinan juga menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa, seperti program National Cadet Corps di India dan Combined Cadet Force di Inggris.

La Makiki menegaskan bahwa para alumni Paskibraka nantinya diharapkan tidak berhenti pada pengalaman menjadi pengibar bendera semata, melainkan mampu berkontribusi bagi daerah melalui pembinaan generasi berikutnya. "Kami ingin setiap kecamatan memiliki kader Purnapaskibraka yang dapat membimbing adik-adiknya sehingga pengalaman dan kemampuan yang diperoleh dapat terus berlanjut," katanya. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan optimistis pelaksanaan Paskibraka pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 dapat berlangsung sukses sekaligus memperkuat pembentukan karakter generasi muda daerah. (*)

Polres Baubau Pisahkan Penanganan Dua Kasus Asmar, Satu Sebagai Korban dan Satunya Lagi Sebagai Tersangka

menjelaskan bahwa kedua kasus tersebut tidak saling berkaitan dan diproses secara terpisah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Penetapan tersangka terhadap saudara Asmar dan penahanannya didasarkan pada laporan polisi yang kami terima pada April 2026. Sementara kasus pembacokan yang menjadikan saudara Asmar sebagai korban merupakan peristiwa yang berbeda yang terjadi pada Oktober 2025," ujar Fatih.

Ia menegaskan, penyidik tetap menangani kedua perkara tersebut secara profesional dan objektif tanpa mencampuradukkan proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam kasus pembacokan yang dialami Asmar, Polres Baubau telah menetapkan seorang tersangka berinisial Y. Meski demikian, penyidik masih terus melakukan pengem-

banan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut.

"Saat ini kami sudah menetapkan satu orang tersangka berinisial Y. Namun proses penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami apakah terdapat pelaku lain yang turut melakukan penganiayaan secara bersama-sama," tutur Fatih pada awak media, Sabtu (13/6/2026).

Terkait motif pembacokan, Fatih menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa tersebut diduga dipicu oleh persoalan lama atau dendam antara Asmar dan tersangka.

"Motifnya masih kami dalam lebih lanjut. Indikasi awal mengarah pada adanya persoalan lama atau dendam antara kedua belah pihak," jelasnya.

Sementara itu, dalam perkara yang menjerat Asmar sebagai tersangka, peristiwa tersebut terjadi pada April 2026 di kawasan Jembatan Tengah, Kota Baubau. Berdasarkan hasil penyidikan, korban dalam kasus tersebut bernama Aswin.

Saat kejadian, korban diketahui sedang berkumpul bersama sejumlah rekannya di pinggir jalan sekitar Jembatan Tengah. Polisi menyebut Asmar datang bersama seorang rekannya dan diduga melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap korban.

"Korban saat itu sedang duduk bersama teman-temannya di sekitar Jembatan Tengah. Kemudian saudara Asmar bersama rekannya datang dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam," ungkap Fatih.

Setelah kejadian, Asmar melarikan diri dan masuk dalam daftar

pencarian orang (DPO). Tim Opsnal Polres Baubau kemudian melakukan pengejaran selama kurang lebih dua bulan dengan dukungan personel dari Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Setelah dilakukan pencarian selama kurang lebih dua bulan, yang bersangkutan berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Polres Baubau dibantu personel Polda Sultra dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan," ujarnya.

Atas perbuatannya, Asmar dijerat dengan pasal yang disangkakan penyidik dan saat ini telah ditahan di Polres Baubau guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polres Baubau memastikan seluruh proses penyidikan terhadap kedua perkara tersebut akan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. (*)

Bapenda Buton Selatan Optimisti Penerimaan PBB Meningkatkan, Data Objek Pajak Akan Disinkronkan dengan BPN

belum pernah mengalami kenaikan.

"Sejak Buton Selatan terbentuk hingga saat ini, tarif PBB-P2 yang menjadi kewajiban masyarakat belum pernah dinaikkan. Nilainya masih tetap seperti sebelumnya," ujar Meizat saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026).

Meski demikian, pihaknya optimistis penerimaan dari sektor PBB-P2 dapat meningkat pada tahun 2025 dan 2026 melalui perbaikan basis data objek pajak. Menurutnya, data bidang tanah yang dimiliki BPN jauh lebih besar dibandingkan data yang saat ini tercatat di pemerintah daerah.

"Kami melihat masih banyak potensi objek pajak yang belum terdata. Berdasarkan informasi dari BPN, jumlah bidang tanah yang telah terdaftar bisa mencapai tiga hingga empat kali lipat dibandingkan data yang kami miliki saat ini," jelasnya.

Untuk itu, Bapenda berencana menjalin kerja sama dengan BPN melalui perjanjian kerja sama (PKS) guna menyinkronkan data pertanahan dan data objek pajak daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas basis pajak sekaligus menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak.

"Data pemerintah daerah dan data BPN harus terkoneksi dan sinkron. Dengan begitu,

kewajiban masyarakat dalam membayar pajak dapat lebih merata dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah," katanya.

Selain membenahan data, Bapenda juga terus mendorong kemudahan layanan pembayaran pajak melalui sistem digital. Saat ini masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB-P2 menggunakan QRIS maupun melalui jaringan ATM Bank Sultra tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Menurut Meizat, digitalisasi pembayaran menjadi solusi untuk mengatasi keterlambatan pembayaran pajak yang selama ini kerap terjadi akibat faktor kesibukan masyarakat.

"Biasanya masyarakat bukan tidak mau membayar, tetapi sering lupa karena kesibukan. Akibatnya pembayaran melewati tahun berjalan dan dikenakan denda sesuai ketentuan. Dengan QRIS, masyarakat bisa membayar kapan saja dan di mana saja," ujarnya.

Selain pembayaran secara digital, masyarakat juga tetap dapat melakukan pembayaran secara langsung di kantor pelayanan maupun melalui kanal pembayarannya yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Bapenda juga melibatkan camat, lurah, dan kepala desa dalam upaya meningkatkan kesadaran

masyarakat membayar pajak. Secara berkala, realisasi penerimaan pajak di setiap wilayah disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan desa agar dapat diteruskan kepada warga.

"Kami rutin menyampaikan progres realisasi pajak kepada camat, lurah, dan kepala desa. Mereka membantu mengingatkan masyarakat agar segera memenuhi kewajiban membayar PBB setiap tahunnya," jelas Meizat.

Untuk memantau efektivitas pembayaran digital, Bapenda setiap bulan berkoordinasi dengan pihak Bank Sultra guna memperoleh laporan transaksi dan realisasi penerimaan pajak yang masuk melalui QRIS maupun kanal pembayaran elektronik lainnya.

"Jadi, Program pembayaran pajak berbasis digital tersebut telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir dan dinilai cukup membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan sekaligus memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan," pungkasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Bapenda Buton Selatan berharap penerimaan PBB-P2 terus meningkat dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Buton Selatan. (*)

STAI YPIQ Baubau Buka PMB 2026/2027, Tiga Prodi Jadi Andalan, Siapkan Beasiswa dan Fasilitas Perkuliahan, SPP Bisa Dicicil

agai negara, termasuk Indonesia, yang dalam dua dekade terakhir memperkuat transformasi perguruan tinggi Islam dari institut menjadi universitas untuk meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun internasional.

STAI YPIQ Baubau pada tahun akademik ini menawarkan tiga program studi utama, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI), Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). Ketiga program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tenaga pendidik dan konselor berbasis nilai keislaman.

Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan STAI YPIQ Baubau, Wa Ode Riska Fauzia Ali, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa kampus berkomitmen menghadirkan pendi-

dikan berkualitas dengan biaya yang tetap terjangkau bagi masyarakat. "Kampus ini juga didukung berbagai fasilitas penunjang pembelajaran seperti ruang kelas interaktif, perpustakaan, akses internet, dan lokasi yang strategis di pusat Kota Baubau," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa STAI YPIQ Baubau turut menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa yang memenuhi syarat tertentu. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi.

Dari sisi pembiayaan, kampus menetapkan SPP sebesar Rp1.500.000 per semester yang dapat dicicil hingga tiga kali pembayaran. "Skema pembayaran ini kami siapkan agar tidak membebani mahasiswa

maupun orang tua," kata Riska.

Proses pendaftaran mahasiswa baru dapat dilakukan secara langsung maupun daring. Untuk pendaftaran offline, calon mahasiswa dapat mendaftarkan diri di kampus melalui nomor 0852-4476-1728, sementara pendaftaran online tersedia melalui kontak 0853-4456-0414.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, lembaga seperti STAI YPIQ Baubau menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Islam yang telah berkembang sejak masa awal kemerdekaan, ketika madrasah dan sekolah tinggi agama mulai diperluas sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga pendidik agama di berbagai daerah. Secara global, tren serupa juga terlihat di negara-negara sepe-

ti Malaysia, Mesir, dan Turki yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan modern.

Pihak kampus menegaskan bahwa PMB ini bukan hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga memperkuat misi pembentukan generasi yang unggul dalam ilmu dan berakhlak. "Kami berharap lulusan STAI YPIQ Baubau mampu bersaing dan memberi kontribusi nyata di tengah masyarakat," demikian pernyataan resmi kampus.

Dengan dibukanya penerimaan mahasiswa baru ini, STAI YPIQ Baubau berharap minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi semakin meningkat, sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang profesional, religius, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. (*)

Jokowi Tak Bantah Isu Bergabung ke PSI, Wacana Politik Menguat



Ilustrasi. Jokowi respons kabar jadi Ketua Dewan Pembina PSI

Laporan: Rahmat

SOLO, BP- Isu keterlibatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menguat setelah pernyataan sejumlah elite partai dan respons terbuka dari Jokowi sendiri yang tidak membantah kabar tersebut.

Wacana tersebut mencuat di tengah proses konsolidasi internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tengah mempercepat pembenahan struktur organisasi hingga tingkat daerah sebagai persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai politik di tingkat nasional.

Dalam sejumlah kesempatan, PSI disebut tengah menyiapkan posisi strategis bagi Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina partai, meskipun hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai status keanggotaannya.

Di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (19/6), Jokowi merespons isu tersebut dengan menegaskan bahwa setiap proses politik memiliki mekanisme yang harus dipatuhi oleh semua pihak tanpa pengecualian.

"Di PSI itu kan ada mekanisme partai yang harus dilalui. Tidak hanya penjaketan aja

langsung," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena dianggap sebagai sinyal bahwa proses komunikasi politik antara Jokowi dan PSI memang sedang berlangsung, meski belum mengarah pada pengumuman resmi.

Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam kegiatan politik dan sosial yang melibatkan PSI maupun masyarakat luas di berbagai daerah.

"Yang paling penting undangan dari masyarakat dan dari PSI akan saya hadiri semua," ujarnya.

Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh kerja politik PSI apabila memang dibutuhkan dalam konteks kemenangan dan penguatan partai.

"Seperti yang saya sampaikan di Kongres, di Rakernas (PSI), saya akan kerja mati-matian untuk PSI," ucap Jokowi.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengungkapkan bahwa partainya tengah menyiapkan struktur organisasi yang lebih lengkap hingga tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Menurut Grace, langkah tersebut

merupakan bagian dari persiapan PSI menghadapi proses verifikasi partai politik yang akan datang, sekaligus memperkuat basis organisasi secara nasional.

Ia juga menyebutkan bahwa Jokowi akan segera mengenakan simbol resmi PSI sebagai bagian dari keterlibatan formal dalam struktur partai. Hal itu disampaikan dalam kunjungannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

"Jadi PSI secara nasional di semua provinsi DPW, agar melengkapi struktur sampai di tingkat desa dan kelurahan", agar Bapak Dewan Pembina bisa segera secara formal memakai jaket PSI," ujar Grace.

Selain Grace, sejumlah elite PSI seperti Ketua Umum DPP PSI Isyana Bagoes Oka dan Ketua Harian PSI Ahmad Ali juga turut menguatkan narasi bahwa partai tersebut sedang melakukan penguatan struktur secara menyeluruh.

Secara historis, fenomena tokoh nasional yang beralih atau terlibat dalam partai politik setelah menjabat sebagai presiden bukan hal baru dalam politik Indonesia. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yud-

hoyono, misalnya, membangun Partai Demokrat sebelum menjabat presiden, sementara Megawati Soekarnoputri tetap menjadi figur sentral PDI Perjuangan pasca kepresidenannya.

Di tingkat global, sejumlah mantan kepala negara juga aktif dalam politik partai setelah masa jabatan berakhir, seperti mantan pemimpin di Amerika Latin dan Eropa yang tetap memegang posisi strategis di partai politik masing-masing sebagai bentuk pengaruh politik lanjutan.

Dalam konteks ini, wacana keterlibatan Jokowi dalam PSI dinilai menjadi bagian dari dinamika politik pasca-pemerintahan yang kerap terjadi dalam sistem demokrasi modern, di mana figur mantan presiden tetap memiliki pengaruh signifikan dalam peta politik nasional.

Hingga saat ini, PSI belum memberikan pengumuman resmi terkait status keanggotaan Jokowi, namun pernyataan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa komunikasi politik antara kedua belah pihak terus berlangsung dan menjadi perhatian publik luas.*

PDIP Disebut Penyeimbang, Golkar dan PKB Beri Catatan Kritis



Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji bilang pihaknya menghormati sikap politik PDIP yang disebut sejumlah peting-gingnya sebagai partai penyeimbang.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Dinamika politik nasional kembali menghangat setelah pernyataan dari Partai Golkar yang menyoroti sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disebut berada dalam posisi "penyeimbang" di tengah pemerintahan dan oposisi. Pernyataan ini memicu diskusi publik terkait kejelasan posisi politik PDIP dalam lanskap demokrasi Indonesia.

Isu tersebut mencuat seiring meningkatnya kritik publik dan sejumlah aksi demonstrasi yang menyoroti kebijakan pemerintah baru-baru ini. Dalam konteks itu, posisi PDIP sebagai partai besar di parlemen kembali menjadi perhatian berbagai pihak.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa pihaknya menghormati setiap pilihan sikap politik partai lain, termasuk PDIP yang menyebut diri sebagai penyeimbang dalam sistem demokrasi.

Namun, Sarmuji mempertanyakan makna konkret dari istilah tersebut dalam praktik politik. Ia menyebut bahwa publik pada akhirnya akan menjadi penilai utama terhadap efektivitas posisi tersebut.

"Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa istilah penyeimbang sebenarnya dapat dipahami dalam kerangka politik praktis, namun tetap membutuhkan penjelasan yang lebih jelas agar

tidak menimbulkan multitafsir di ruang publik.

Sementara itu, kritik serupa juga datang dari Partai Kebangkitan Bangsa yang menilai bahwa sikap politik harus tegas, terutama dalam sistem demokrasi multipartai seperti di Indonesia.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai bahwa partai politik tidak seharusnya berada dalam posisi abu-abu antara mendukung pemerintah dan menjadi oposisi.

"Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang menjalankan janji Presiden," kata Jazilul.

Ia juga menyoroti keterlibatan tokoh PDIP, termasuk mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, yang terlihat hadir dalam aksi mahasiswa di kawasan Bundaran HI beberapa waktu lalu. Hal tersebut dinilai memperkuat perdebatan soal konsistensi sikap politik PDIP.

Dalam sejarah politik Indonesia, perdebatan mengenai posisi oposisi dan koalisi bukan hal baru. Sejak era reformasi 1998, partai politik kerap bergeser antara mendukung pemerintah dan mengambil jarak kritis, termasuk Partai Golkar yang pernah mengalami transformasi besar dari partai pemerintah pada era Orde Baru menjadi partai demokratis.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga pernah berada pada posisi oposisi kuat di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum kemudian

menjadi partai utama pendukung pemerintah pada periode berikutnya.

Dalam perspektif internasional, konsep "penyeimbang" dalam politik juga dikenal di sejumlah negara demokrasi parlementer, seperti di Jerman dan Belanda, di mana partai tengah sering berperan sebagai pengontrol kebijakan tanpa harus berada sepenuhnya di dalam atau di luar pemerintahan.

Namun, di Indonesia yang menganut sistem presidensial multipartai, batas antara oposisi dan koalisi sering kali tidak sejelas sistem parlementer, sehingga istilah penyeimbang kerap memunculkan interpretasi berbeda di kalangan publik maupun elite politik.

Sejumlah pengamat menilai, ketidakjelasan posisi politik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap konsistensi partai dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, terutama dalam isu-isu kebijakan strategis nasional.

Di sisi lain, PDIP belum memberikan respons tambahan terkait kritik tersebut, sementara perdebatan di ruang publik terus berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap konsolidasi politik nasional.

Dengan situasi tersebut, isu mengenai posisi "penyeimbang" PDIP diperkirakan masih akan menjadi bagian dari dinamika politik nasional, terutama menjelang penguatan konsolidasi partai-partai di parlemen.*

Kominfo Kendari Buka Akses Studi Lapangan Sistem Call Center 112 bagi UMK



Sebanyak 19 mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) melakukan studi lapangan ke Command Center Balai Kota Kendari

Laporan: Lisna

KENDARI, BP- Sebanyak 19 mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) melakukan studi lapangan ke Command Center Balai Kota Kendari untuk mempelajari sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi melalui layanan Call Center 112 yang dioperasikan Pemerintah Kota Kendari, Kamis (18/6/2026).

Kunjungan akademik tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap praktik tata kelola pemerintahan modern yang memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UMK, Andi Syaipul, yang mendampingi rombongan mahasiswa, mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar mahasiswa dapat melihat secara langsung implementasi berbagai teori pemerintahan yang selama ini dipelajari di ruang kuliah.

"Kami berharap mahasiswa dapat mengintegrasikan teori akademik dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan di lapangan," ujar Andi Syaipul saat kegiatan berlangsung.

Rombongan mahasiswa diteri-

ma langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, SP., MM. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa Call Center 112 merupakan layanan kedaruratan dan pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam.

Menurut Sahuriyanto, layanan tersebut menjadi salah satu instrumen penting Pemerintah Kota Kendari dalam mempercepat respons terhadap berbagai laporan masyarakat, mulai dari kondisi darurat hingga pengaduan layanan publik.

"Call Center 112 hadir untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terkoordinasi," kata Sahuriyanto.

Dalam kegiatan itu, mahasiswa memperoleh kesempatan melihat secara langsung aktivitas operator di Command Center, termasuk proses penerimaan laporan, verifikasi informasi, hingga mekanisme koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

Diskusi yang berlangsung interaktif dipandu oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Kendari, Dr. Sapri, selaku moderator. Berbagai pertanyaan diajukan mahasiswa mengenai

pola koordinasi lintas instansi, prosedur penanganan laporan, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan layanan kedaruratan.

Sahuriyanto menjelaskan bahwa Command Center berfungsi sebagai pusat kendali berbagai layanan digital pemerintah daerah. Dari pusat kendali tersebut, laporan masyarakat dapat dipantau secara real time sebelum diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan.

"Keberadaan Command Center memungkinkan proses pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat karena seluruh informasi terpusat dalam satu sistem," ujarnya.

Secara nasional, layanan panggilan darurat 112 mulai dikembangkan pemerintah Indonesia sebagai nomor tunggal layanan kedaruratan untuk memudahkan masyarakat memperoleh bantuan dalam berbagai situasi mendesak. Program ini terus diperluas ke berbagai daerah sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Pada tingkat internasional, penggunaan nomor darurat tunggal telah lebih dahulu diterapkan di berbagai negara. Uni Eropa, misalnya, menggunakan nomor 112 sebagai layanan darurat terpadu se-

jak dekade 1990-an, sementara Amerika Serikat mengoperasikan sistem panggilan darurat 911 yang menjadi salah satu model layanan respons cepat paling dikenal di dunia.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong banyak pemerintah daerah di berbagai negara membangun command center sebagai pusat integrasi data, pemantauan layanan publik, serta penanganan situasi darurat secara terpadu. Model tersebut kini menjadi salah satu indikator penting dalam pengembangan konsep smart city.

Melalui studi tour ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh wawasan mengenai operasional layanan Call Center 112, tetapi juga mendapatkan gambaran nyata mengenai bagaimana teknologi digital digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas akademik mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan UMK sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru terkait inovasi pelayanan publik yang relevan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan di era digital. (*)

La Rochelle Perkuat Dukungan Air Bersih dan Pengendalian Banjir Kendari

KENDARI, BP- Pemerintah Kota Kendari memperkuat kerja sama internasional dengan Kota La Rochelle, Prancis, melalui pembahasan program penyediaan air bersih dan penanganan banjir. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kendari, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menerima langsung delegasi Prancis yang terdiri atas unsur pemerintah, dewan kota, tim teknis, hingga lembaga pembiayaan guna membahas langkah konkret menghadapi persoalan lingkungan yang dihadapi ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari kelanjutan hubungan sister city antara Kota Kendari dan La Rochelle yang telah berjalan beberapa tahun terakhir. Kerja sama itu sebelumnya menghasilkan dukungan teknologi pengolahan air bersih yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kendari.

Dalam agenda tersebut, delegasi Prancis memaparkan hasil penelitian dan pemetaan kondisi banjir di Kota Kendari sejak 2013 hingga 2026. Kajian tersebut mencakup identifikasi kawasan rawan banjir, tingkat kerentanan wilayah, jumlah rumah terdampak, serta rekomendasi teknis yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Salah satu fokus kajian berada di sepanjang aliran Sungai Kali Kadia yang melintasi sejumlah wilayah padat penduduk, yakni Puuwatu, Punggolaka, Tobuha, Pondambea, hingga Kadia. Kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu titik yang kerap terdampak genangan saat curah hujan tinggi.

Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan hasil penelitian tersebut akan menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanganan banjir yang lebih terukur dan berkelanjutan.

"Kami sangat mengapresiasi hasil pemetaan dan penelitian yang telah dilakukan. Data ini akan menjadi salah satu acuan penting bagi Pemerintah Kota Kendari dalam menyusun langkah-langkah penanganan banjir yang lebih efektif dan berkelanjutan," kata Sudirman.

Menurut dia, tim teknis dari Prancis tidak hanya melakukan pemetaan kondisi lapangan, tetapi juga akan membantu penyusunan desain teknis pengendalian banjir yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dari hasil kajian awal, delegasi Prancis merekomendasikan pembangunan sekitar lima kolam retensi pada sejumlah lokasi strategis yang masih memiliki lahan kosong. Selain itu, normalisasi aliran Sungai Kali Kadia dari hulu hingga hilir juga dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas tampung sungai dan mengurangi potensi luapan air.

"Insya Allah meraka akan membantu menyusun desain penanganan banjir. Setelah itu akan dilakukan perhitungan kebutuhan fisik yang nantinya disesuaikan dengan standar dan kemampuan Pemerintah Kota Kendari," ujar Sudirman.

Selain membahas pengendalian banjir, kerja sama kedua kota juga menyentuh sektor penyediaan air bersih. Sudirman mengungkapkan bantuan peralatan pengolahan air minum yang diberikan melalui program kerja sama sebelumnya telah memberikan dampak positif bagi masyarakat pengguna layanan PDAM.

Menurutnya, kualitas air yang diterima pelanggan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Perbaikan tersebut menjadi salah satu bukti nyata manfaat kerja sama internasional yang langsung dirasakan masyarakat.

"Tahun lalu meraka membantu melalui dukungan peralatan untuk penjernihan air. Alhamdulillah manfaatnya sangat luar biasa. Masyarakat yang menerima layanan PDAM menyapaikan bahwa kualitas air kini jauh lebih bersih dibanding sebelumnya," katanya.

Secara historis, hubungan kerja sama antarkota atau sister city telah berkembang luas di berbagai negara sejak berakhirnya Perang Dunia II sebagai sarana memperkuat diplomasi masyarakat dan pembangunan daerah. Di Indonesia, sejumlah pemerintah daerah juga memanfaatkan skema tersebut untuk mengembangkan

sektor lingkungan, transportasi, tata kota, hingga pengelolaan sumber daya air.

Di tingkat nasional, isu banjir menjadi salah satu tantangan utama perkotaan. Data berbagai lembaga kebencanaan menunjukkan bahwa banjir secara konsisten menjadi bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Kondisi tersebut mendorong banyak daerah mengembangkan pendekatan terpadu melalui pembangunan kolam retensi, normalisasi sungai, rehabilitasi daerah aliran sungai, serta penguatan sistem drainase perkotaan.

Sementara itu, secara internasional, sejumlah kota di Eropa seperti Rotterdam di Belanda dan Kopenhagen di Denmark telah menerapkan konsep kolam retensi, ruang terbuka hijau resapan air, serta pengelolaan sungai berbasis teknologi untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi penting bagi kota-kota berkembang yang menghadapi ancaman banjir perkotaan.

Delegasi Prancis yang hadir di Kendari juga melibatkan unsur lembaga pembiayaan pembangunan yang selama ini mendukung berbagai proyek kolaborasi internasional. Kehadiran mereka membuka peluang bagi Kota Kendari untuk memperoleh pendampingan teknis maupun dukungan pendanaan pada program infrastruktur lingkungan yang akan dikembangkan.

Pemerintah Kota Kendari berharap kolaborasi dengan La Rochelle dapat terus berlanjut dan menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan air bersih serta menghadirkan solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir.

"Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut. Dukungan desain, pendampingan teknis, hingga kemungkinan dukungan pembiayaan akan sangat membantu Kota Kendari dalam menghadirkan solusi jangka panjang bagi persoalan banjir," pungkaskan Sudirman. (*)

Bupati Azhari Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk Dorong Daya Saing Buton Tengah



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengambil langkah strategis untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi dan koordinasi antara Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati Buton Tengah pada Rabu pagi, 17 Juni 2026.

Pertemuan yang turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait itu membahas penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI), mulai dari penyusunan regulasi hingga inventarisasi aset-aset lokal yang berpotensi memperoleh perlindungan hukum.

Dalam forum tersebut, perhatian utama diarahkan pada percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual. Regulasi itu dipandang penting sebagai landasan hukum untuk melindungi produk kreatif, inovasi daerah, dan berbagai bentuk kearifan lokal masyarakat Buton Tengah.

Selain aspek regulasi, peserta audi-

ensi juga membahas langkah inventarisasi dan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai potensi kekayaan intelektual yang dimiliki daerah. Pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan yang lebih sistematis.

Bupati Azhari menegaskan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah. "Kami ingin potensi lokal, inovasi masyarakat, dan kearifan budaya memiliki perlindungan hukum yang kuat sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah," ujarnya dalam semangat pembahasan yang berlangsung pada audiensi tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. "Kolaborasi ini diharapkan mempercepat lahirnya kebijakan yang mampu melindungi sekaligus mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual secara optimal," katanya.

Pembahasan itu sekaligus menjadi forum koordinasi untuk merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dalam menghadapi perkembangan ekonomi kreatif dan inovasi berbasis masyarakat. Dengan

demikian, pengelolaan kekayaan intelektual dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menilai bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Inventarisasi aset kekayaan intelektual menjadi langkah awal yang penting agar setiap potensi unggulan daerah dapat dikenali, dilindungi, dan dikembangkan," ungkap salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Secara historis, perhatian terhadap perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia terus berkembang sejak pemerintah meratifikasi berbagai kesepakatan internasional dan memperbarui undang-undang di bidang hak cipta, merek, paten, desain industri, serta indikasi geografis. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

Dalam konteks global, perlindungan kekayaan intelektual telah menjadi salah satu instrumen penting pembangunan

ekonomi modern. Organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) selama beberapa dekade mendorong negara-negara anggotanya untuk memperkuat sistem perlindungan KI sebagai sarana meningkatkan investasi, kreativitas, dan daya saing produk di pasar internasional.

Di tingkat daerah, berbagai pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia juga mulai mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan produk lokal melalui pendaftaran merek, hak cipta, maupun indikasi geografis. Langkah tersebut terbukti mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus menjaga identitas budaya dan keunikan daerah.

Melalui kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap penyusunan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual dan pemetaan aset-aset lokal dapat segera direalisasikan. Dengan fondasi hukum yang kuat, potensi unggulan daerah diharapkan mampu berkembang menjadi penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)

Buton Ikuti Rakor Inflasi Nasional, Tito Soroti Harga Minyak Goreng



Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri RI, sekaligus dirangkaikan dengan sejumlah agenda nasional terkait penguatan ekonomi daerah, pada Senin, 15 Juni 2026.

Kegiatan nasional yang dipusatkan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri tersebut juga terhubung dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Buton yang mengikuti dari Anjungan Kantor Bupati Buton.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, hadir mewakili Bupati Buton bersama para Asisten, Staf Ahli, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.

Rapat koordinasi tersebut membahas pengendalian inflasi daerah, sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, serta dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bagian dari penguatan sosial ekonomi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa inflasi nasional masih berada dalam kondisi terkendali berdasarkan data terbaru.

"Inflasi nasional year on year pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen," ujar Tito dalam arahannya dari

Jakarta.

Ia menambahkan bahwa capaian tersebut masih berada dalam target pemerintah yang ditetapkan pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen, sehingga stabilitas harga dinilai relatif terjaga.

Menurut Tito, kondisi inflasi ini mencerminkan efektivitas koordinasi pusat dan daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 2 Juni 2026, tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, serta informasi dan jasa keuangan.

"Komoditas cabai menjadi penyumbang inflasi tertinggi sebesar 0,08 persen, diikuti minyak goreng," kata Tito dalam pemaparan data inflasi tersebut.

Ia juga menyoroti bahwa komoditas beras relatif stabil dan tidak menjadi penyumbang utama inflasi, berbeda dengan beberapa periode sebelumnya di Indonesia yang kerap dipengaruhi harga beras.

Dalam konteks pengendalian pangan, Perum Bulog bersama Kementerian Pertanian dinilai berhasil menjaga ketersediaan stok beras nasional sehingga tekanan inflasi dapat ditekan.

Meski demikian, pemerintah tetap waspada terhadap kenaikan harga pada komoditas strategis lainnya seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, serta minyak goreng yang masih fluktuatif di berbagai daerah.

"Nah, yang perlu diwaspadai adalah minyak goreng karena merupakan kebutuhan utama masyarakat," ujar Tito.

Ia menambahkan bahwa terdapat 165 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga minyak goreng, sementara 73 daerah lainnya justru mengalami penurunan.

Secara historis, Indonesia kerap menghadapi tantangan inflasi pangan, terutama pada periode krisis harga pangan global 2008 dan lonjakan inflasi pasca-pandemi COVID-19 pada 2022, ketika gangguan rantai pasok global memicu kenaikan harga komoditas energi dan pangan di berbagai negara.

Di tingkat global, lembaga ekonomi internasional seperti IMF mencatat bahwa tekanan inflasi dunia mulai mereda sejak 2024, setelah sebelumnya mencapai puncak akibat konflik geopolitik dan disrupti pasokan energi.

Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama serta penyerahan Sampul Peringatan Sinergi Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari penguatan data ekonomi nasional.

Pemerintah Kabupaten Buton menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian inflasi, penguatan data ekonomi, serta sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah. (*)

Bupati Buton Tengah Azhari Dorong Layanan Kesehatan Gratis Menjangkau Lebih Banyak Desa



Peliput: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, mendorong agar program pelayanan kesehatan gratis diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Harapan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Sunatan Massal dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Sabtu (20/6/2026), yang diikuti ratusan warga.

Menurut Azhari, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menilai kehadiran pemerintah akan lebih bermakna apabila diwujudkan melalui layanan yang mudah diakses, cepat, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh terhambat oleh hal-hal yang bersifat seremonial," ujar Azhari dalam sambutannya di hadapan peserta kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengusulkan agar kegiatan sunatan massal dan pemeriksaan

kesehatan gratis tidak hanya dilaksanakan di satu desa, tetapi dapat dirancang melibatkan beberapa desa sekaligus. Langkah itu diyakini mampu memperluas cakupan penerima manfaat dan meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus terus menghadirkan program-program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat. "Kehadiran pemerintah harus diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, mudah dijangkau, dan memberikan dampak nyata bagi warga," katanya.

Kegiatan sosial tersebut menghadirkan berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, hingga sunatan massal tanpa dipungut biaya. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya jumlah peserta yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan panitia.

Bupati Azhari turut memberikan apresiasi kepada dokter spesialis, dokter umum, perawat, serta seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, dedikasi para tenaga medis menjadi bagian pent-

ing dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.

Penghargaan juga disampaikan kepada TP-PKK, PMI, Yayasan Haji Kalla, serta seluruh panitia dan pihak yang telah bersinergi menyukseskan kegiatan tersebut. "Kolaborasi berbagai pihak seperti ini perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas," ungkapnya.

Selain membahas pelayanan kesehatan, Azhari mengingatkan pentingnya validitas data dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menilai data yang akurat menjadi syarat utama agar berbagai program pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

"Validitas data harus terus dijaga sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," tegasnya.

Secara historis, penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di Indonesia telah menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan dasar, terutama setelah reformasi sistem jaminan kesehatan nasional yang terus berkembang dalam satu dekade terakhir. Berbagai daerah juga rutin menggelar

bakti sosial kesehatan sebagai pelengkap layanan kesehatan formal untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan.

Dalam konteks internasional, organisasi kesehatan dunia selama bertahun-tahun mendorong negara-negara untuk memperkuat layanan kesehatan primer dan preventif sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program pemeriksaan kesehatan, edukasi, dan layanan medis berbasis komunitas dinilai efektif dalam mendukung deteksi dini penyakit serta memperluas akses pelayanan bagi kelompok rentan.

Kegiatan di Desa Wadiabero turut dihadiri Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, S.Sos., Ketua TP-PKK Buton Tengah Umi Noranah Azhari, staf ahli PKK Kartini Adam Basan, sejumlah anggota DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah, kepala desa se-Kecamatan Gu, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan dukungan bersama terhadap penguatan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah. (*)

Melalui program itu, pemerintah menar-

Kemendes Tegaskan Tidak Ada Pengelembungan Anggaran Alkes RSUD Kruai



Peliput: Warman

KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia Kementerian Kesehatan RI menegaskan tidak terdapat pengelembungan anggaran dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk layanan hemodialisis (HD) di RSUD KH Muhammad Thohir Kruai, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan adanya mark up anggaran dalam program pengadaan tersebut.

Isu tersebut mencuat setelah publik menyuarakan angka pengadaan yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah dan dikaitkan secara keliru hanya dengan layanan HD di rumah sakit daerah tersebut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sebuah kesempatan bersama Presiden RI menegaskan bahwa angka tersebut bukan diperuntukkan secara khusus untuk layanan hemodialisis, melainkan bagian dari penguatan fasilitas kesehatan secara menyeluruh.

Dalam agenda persmian RSUD KH Muhammad Thohir Kruai Pesisir Barat, Lampung, bersama Presiden RI Prabowo Subianto, dijelaskan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari program nasional peningkatan layanan kesehatan daerah.

Program tersebut berada dalam skema Strengthening Indonesia 'Healthcare Referral Network (SIHREN) SIHREN, yang bertujuan memperkuat sistem rujukan kesehatan nasional di berbagai rumah sakit daerah.

Melalui program itu, pemerintah menar-

getkan 66 RSUD yang masuk dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) atau Quick Win untuk mendapatkan dukungan alat kesehatan canggih.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa nilai pengadaan yang beredar tidak bisa dipersempit hanya untuk satu layanan.

"Masing-masing RSUD akan mendapatkan dukungan alkes canggih senilai lebih dari Rp 30 miliar dari program SIHREN. Angka ini bukan hanya untuk layanan HD," ujar Aji.

Ia menambahkan bahwa pengadaan tersebut mencakup berbagai alat kesehatan modern seperti cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, dan mammography yang mendukung layanan diagnostik dan terapi secara luas.

Selain peralatan canggih, RSUD KH Muhammad Thohir Kruai Pesisir Barat, Lampung RSUD KH Muhammad Thohir Kruai Pesisir Barat juga menerima dukungan alat kesehatan dasar untuk penguatan layanan medis.

Dukungan alat kesehatan dasar tersebut mencakup bed pasien, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor ICU, syringe pump, USG, hingga ventilator untuk berbagai kelompok pasien.

"Kami berharap masyarakat tidak termakan hoaks yang beredar seolah-olah ada pengelembungan harga dalam pengadaan ini," kata Aji Muhawarman menanggapi isu yang berkembang di ruang publik.

Total dukungan yang diterima RSUD Kruai dalam program tersebut mencapai sekitar Rp31,7 miliar untuk alat kesehatan canggih dan sekitar Rp25 miliar untuk penguatan alat dasar pada periode anggaran 2025-2026.

Dengan demikian, total investasi fasilitas kesehatan untuk RSUD tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp56,7 miliar yang mencakup peningkatan layanan gawat darurat, operasi, hingga diagnostik modern.

Secara historis, penguatan layanan kesehatan berbasis teknologi seperti CT scan dan cathlab telah menjadi bagian penting transformasi sistem kesehatan global sejak akhir abad ke-20, terutama dalam menurunkan angka kematian penyakit jantung dan stroke.

Di Indonesia, perluasan akses alat kesehatan modern semakin dipercepat sejak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, sehingga kebutuhan fasilitas rujukan di daerah terus meningkat.

Kebijakan penguatan RSUD melalui SIHREN dinilai sejalan dengan upaya global World Health Organization (WHO) dalam memperkuat sistem rujukan kesehatan agar layanan tidak terputus di kota besar.

Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan RSUD Kruai diharapkan mampu meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat di wilayah Pesisir Barat sehingga pasien tidak perlu dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan layanan medis lanjutan. (*)

PT FAREN GRAFIKA



KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak: Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com
Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Roy Suryo dan dr Tifa Ditangkap, Tim Hukum Tuding Ada Intervensi Politik



Roy Suryo bersama dr Tifa di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Penangkapan Roy Suryo Notodiprojo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memicu polemik baru. Tim kuasa hukum kedua tersangka menilai langkah penegak hukum tersebut tidak diperlukan karena klien mereka selama ini dinilai kooperatif dalam menjalani proses penyidikan.

Penangkapan dilakukan pada Jumat (19/6/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. Informasi itu pertama kali diterima tim kuasa hukum dari keluarga Roy Suryo, yang mengabarkan bahwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut diamankan oleh penyidik di kediamannya.

Pada waktu yang hampir bersamaan, kuasa hukum juga memperoleh informasi bahwa dr Tifa turut ditangkap dalam perkara yang sama. Kedua nama tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Kasus ini memasuki babak baru setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara kedua tersangka telah lengkap atau P21. Dengan status tersebut, proses hukum selanjutnya mengarah pada pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum sebelum perkara disidangkan di pengadilan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes

Iman Imanuddin sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh petunjuk yang diberikan jaksa telah dipenuhi penyidik. Karena itu, berkas yang diajukan kepolisian dinyatakan lengkap dan siap memasuki tahap berikutnya.

"Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi," ujar Iman saat memberikan keterangan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

Meski demikian, langkah penangkapan tersebut mendapat respons keras dari tim kuasa hukum Roy Suryo. Mereka menilai penyidik seharusnya cukup menggunakan mekanisme pemanggilan resmi apabila tujuannya adalah pelaksanaan pelimpahan tahap dua.

"Kami menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa melalui penangkapan terhadap klien kami, padahal klien kami selama ini kooperatif memenuhi panggilan penyidik bahkan selalu melaksanakan wajib lapor," demikian pernyataan tim kuasa hukum Roy Suryo.

Menurut mereka, tindakan penangkapan menjadi tidak proporsional karena tidak ditemukan indikasi bahwa kedua tersangka berupaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Tim hukum juga mengaitkan penangkapan tersebut dengan dugaan adanya

kepentingan politik yang memengaruhi proses penegakan hukum. Mereka menilai penggunaan upaya paksa justru memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Kami meyakini penangkapan ini adalah konfirmasi bahwa hukum tidak berjalan sesuai norma dan etika, melainkan sudah melayani kepentingan politik Jokowi," kata tim kuasa hukum dalam pernyataan tertulisnya.

Sebelum penangkapan terjadi, Roy Suryo sempat mempertanyakan pengumuman status P21 yang disampaikan pihak kepolisian. Dalam sebuah wawancara televisi pada awal Juni lalu, ia menilai pengumuman tersebut dilakukan secara terpaksa dan mempertanyakan dasar administratif yang digunakan penyidik.

"Kalau kepolisian itu sudah punya surat ini dari kejaksaan pasti sudah diumumkan tanggal terbitnya berapa. Kemudian tanggal penyerahan tahap keduanya itu kapan," ujar Roy Suryo saat itu.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, status P21 merupakan tahapan penting yang menandakan hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh jaksa. Setelah itu, penyidik menyerahkan dan barang bukti kepada jaksa untuk dipersiapkan menuju proses persidangan.

Secara historis, sejumlah perkara yang melibatkan tokoh publik di Indonesia juga pernah memasuki fase kontroversial ketika proses

penegakan hukum beririsan dengan perdebatan politik. Kasus yang melibatkan pejabat, aktivis, maupun figur publik kerap memunculkan perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum dan pihak yang diperiksa.

Di tingkat internasional, perdebatan mengenai hubungan antara hukum dan politik juga menjadi isu yang berulang di berbagai negara demokrasi. Sejumlah kasus yang melibatkan mantan kepala negara, tokoh oposisi, maupun figur publik di Amerika Serikat, Korea Selatan, Brasil, hingga Prancis menunjukkan bahwa proses hukum terhadap tokoh terkenal sering kali memicu perdebatan mengenai independensi lembaga penegak hukum.

Terlepas dari polemik yang berkembang, proses hukum terhadap Roy Suryo dan dr Tifa kini memasuki tahapan lanjutan. Setelah pelimpahan tahap dua dilakukan, jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan.

Persidangan nantinya akan menjadi forum untuk menguji seluruh alat bukti, keterangan saksi, serta argumentasi hukum dari masing-masing pihak. Melalui proses tersebut, majelis hakim akan menentukan apakah dakwaan yang diajukan penuntut umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku. (*)

Sony Sonjaya Ungkap 41 Nama Baru, Kejagung Dalam Dugaan CCTV Fiktif MBG

JAKARTA, BP- Penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026 memasuki babak baru setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyerahkan sejumlah informasi tambahan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Informasi tersebut mencakup daftar 41 nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dugaan pengadaan CCTV dan alat sidik jari yang diduga fiktif.

Perkembangan terbaru itu terungkap usai pemeriksaan Sony Sonjaya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/6). Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan bahwa jumlah nama yang sebelumnya berjumlah 26 orang bertambah menjadi 41 orang setelah penyidik menemukan data tambahan dalam percakapan elektronik yang diperiksa.

Menurut Krisna, sejumlah pihak diduga meminta alokasi titik SPPG untuk individu atau kelompok tertentu yang memiliki hubungan dengan mereka. Temuan tersebut memperluas ruang lingkup penyidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

"Tadi dibuka oleh penyidik, ternyata ada tabel yang berisi usulan nama-nama baru. Totalnya bertambah dari 26 menjadi 41 nama," kata Krisna Murti kepada wartawan di Kejaksaan Agung.

Meski demikian, pihak kuasa hukum enggan membeberkan identitas para pihak yang masuk dalam daftar tersebut. Ia hanya menyebut sebagian nama yang beredar di media sosial memang sesuai dengan data yang dimiliki penyidik, sementara sebagian lainnya tidak benar.

Selain menyerahkan daftar nama baru, Sony juga mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan sarana pendukung Program MBG. Dugaan itu berkaitan dengan proyek pengadaan sekitar 5.000 unit kamera pengawas (CCTV) dan perangkat pemindai sidik jari yang direncanakan dipasang di berbagai SPPG di Indonesia.

Krisna menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang untuk mengawasi operasional

layanan gizi sekaligus memverifikasi penerima manfaat program. Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan kliennya, keberadaan perangkat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak vendor yang bertanggung jawab atas pengadaan.

"Ketika diminta menunjukkan lokasi pemasangan CCTV yang sudah ada, pihak vendor tidak bisa memperlihatkannya," ujar Krisna.

Ia menambahkan, nilai proyek pengadaan CCTV dan alat sidik jari tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp300 miliar. Karena itu, pihaknya meminta penyidik mendalami proyek tersebut guna memastikan ada atau tidaknya kerugian negara yang timbul.

"Kalau barangnya tidak ada dan tidak bisa dibuktikan keberadaannya, tentu harus ditelusuri lebih jauh oleh penyidik," katanya.

Dalam pemeriksaan yang sama, Sony juga menjelaskan adanya sosok berinisial NSD yang disebut pernah meminta perubahan yayasan pengelola SPPG tanpa mekanisme administrasi resmi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), perubahan itu dilakukan hingga tiga kali terhadap yayasan yang mengelola sejumlah titik layanan gizi.

"Dalam BAP dijelaskan bahwa ada beberapa titik yang yayasannya diubah berkali-kali dan menurut keterangan Pak Sony, titik-titik tersebut terkait dengan NSD," ungkap Krisna.

Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan enam tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, dan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Hari-mas Sihombing.

Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan penyidik, Program MBG semestinya dijalankan melalui yayasan SPPG yang memiliki keterkaitan dengan sekolah penerima manfaat. Namun dalam praktiknya, sejumlah yayasan diduga memperoleh penunjukan karena memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu di lingkungan

gan BGN.

Penyidik juga mengemukakan indikasi bahwa sebagian yayasan yang menjadi mitra program tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis. Kondisi tersebut diduga membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara.

Selain persoalan yayasan, Kejagung mengungkap adanya dugaan mark up harga dalam berbagai pengadaan barang yang berkaitan dengan Program MBG. Di antaranya pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Secara historis, kasus penyimpangan dalam program bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Pada masa pandemi Covid-19, publik sempat dihadapkan pada kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret sejumlah pejabat negara dan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Kasus tersebut menjadi salah satu perkara korupsi bantuan publik terbesar dalam sejarah Indonesia.

Di tingkat internasional, berbagai negara juga pernah menghadapi persoalan serupa. Pada masa pandemi, sejumlah negara di Eropa, Amerika Latin, dan Afrika menemukan penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan, perangkat pemantauan digital, hingga distribusi bantuan pangan. Organisasi seperti Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berulang kali mengingatkan bahwa program sosial berskala besar memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi apabila tidak disertai pengawasan yang ketat dan transparan.

Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan dalam Program MBG dinilai penting untuk memastikan anggaran publik benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Penyidikan yang kini dilakukan Kejaksaan Agung diharapkan mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab serta memulihkan kerugian negara apabila terbukti terjadi tindak pidana korupsi. (*)

Ketua TP PKK Baubau Hj Sitti Aryati Yusran Dorong Orang Tua Adaptif Mengasuh Anak di Era Digital Dengan Galakkan E-Parenting



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Baubau, Hj Sitti Aryati Yusran, mendorong penguatan pola asuh digital atau E-Parenting sebagai langkah strategis membekali keluarga menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Seruan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan di Kecamatan Lea-Lea dan Bungi pada Rabu (17/6/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas orang tua dalam mendampingi anak-anak yang tumbuh di era internet dan media sosial. Melalui pendekatan E-Parenting, keluarga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara produktif sekaligus meminimalkan dampak negatifnya terhadap perkembangan anak.

Dalam sambutannya, Hj Sitti Aryati Yusran menegaskan bahwa keluarga memiliki posisi sentral dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Menurutnya, kualitas bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan pengasuhan yang berlangsung di lingkungan keluarga.

"Keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Jika fondasinya kuat, maka bangsa ini akan kokoh berdiri. Oleh karena itu, pembinaan kualitas orang tua sebagai pendidik pertama dan

utama bagi anak-anak menjadi prioritas yang tidak boleh ditunda," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tantangan orang tua saat ini jauh berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu. Anak-anak kini hidup berdampingan dengan gawai, internet, dan beragam platform digital yang menghadirkan peluang besar sekaligus risiko apabila tidak digunakan secara bijaksana.

Karena itu, konsep E-Parenting dipandang sebagai bentuk adaptasi pola pengasuhan terhadap perubahan zaman. Pendekatan tersebut bukan bertujuan menjauhkan anak dari teknologi, melainkan mengarahkan mereka agar mampu memanfaatkan perangkat digital secara sehat, aman, dan bertanggung jawab.

"E-Parenting bukan berarti melarang anak menggunakan teknologi, melainkan bagaimana orang tua bisa menjadi penunjang yang bijak agar teknologi menjadi sarana yang bermanfaat, bukan sumber kerusakan," kata Hj Sitti Aryati Yusran.

Dalam paparannya, ia menguraikan empat sasaran utama penerapan E-Parenting. Pertama, meningkatkan pemahaman orang tua mengenai dampak positif dan negatif dunia digital sehingga tidak terjadi kesenjangan pengetahuan antara orang tua dan anak.

Kedua, memperkuat strategi komunikasi yang efektif di lingkungan keluarga. Orang tua didorong menjadi tempat berbagi cerita yang nyaman

sehingga anak tidak mencari pelarian atau ruang curhat yang berpotensi menimbulkan risiko di dunia maya.

Ketiga, mendorong pendampingan aktif saat anak menggunakan gawai, disertai penanaman nilai moral dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Pendekatan edukatif dinilai lebih efektif daripada sekadar memberikan larangan tanpa penjelasan yang memadai.

Keempat, mengajak orang tua melakukan refleksi terhadap perilaku mereka sendiri dalam menggunakan teknologi. Menurutnya, anak merupakan peniru yang baik sehingga keteladanan menjadi faktor penting dalam membangun budaya digital yang sehat di rumah.

"Anak adalah peniru ulung. Karena itu, orang tua juga harus bijak dan mampu membatasi diri dalam menggunakan gawai di lingkungan keluarga," tegasnya.

Lebih lanjut, Hj Sitti Aryati Yusran menyampaikan bahwa program E-Parenting merupakan inovasi sekaligus revitalisasi dari penyuluhan pola asuh tradisional yang selama ini dijalankan PKK agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni semata, tetapi berkembang menjadi gerakan berkelanjutan. Pengurus PKK di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga RW diharapkan menjadi ujung tombak penyebaran literasi digital keluarga melalui forum diskusi dan berbagi pengalaman antarorang tua.

"Saya berharap pengurus PKK di semua tingkatan dapat menjadi garda terdepan untuk menyebarluaskan ilmu ini melalui diskusi rutin dan ruang berbagi pengalaman antarorang tua," imbuhnya.

Di akhir kegiatan, Ketua TP PKK Kota Baubau menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan acara. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari demi membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Secara historis, perhatian terhadap literasi digital keluarga terus meningkat di berbagai negara seiring melonjaknya penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja sejak awal dekade 2010-an. Di Indonesia, berbagai program literasi digital dan penguatan peran keluarga juga terus dikembangkan oleh pemerintah dan berbagai lembaga untuk meningkatkan keamanan serta etika bermedia di ruang digital.

Pada tingkat internasional, organisasi seperti UNESCO dan UNICEF dalam berbagai publikasi selama beberapa tahun terakhir turut menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi aktivitas digital anak.

Pendampingan yang konsisten dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mengoptimalkan manfaat teknologi sekaligus mengurangi potensi risiko seperti paparan konten negatif, perundungan siber, maupun penyalahgunaan informasi pribadi. (*)

Kolaborasi Pemkot Baubau dan BAZNAS Hadirkan Sunatan Massal Sambut Tahun Baru Islam, Sasar Ratusan Warga



Laporan: Andina

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau memanfaatkan momentum peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah untuk memperkuat pelayanan sosial melalui penyelenggaraan sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan yang berlangsung di MAN 1 Baubau pada Selasa (16/06/2026) itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si.

Program tersebut digelar sebagai hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Baubau, Kementerian Agama, Panitia Hari Besar Islam (PHBI), BAZNAS Kota Baubau, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Baubau, dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam. Sinergi lintas lembaga itu ditujukan untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan dan pelaksanaan khitan.

Dalam sambutannya, La Ode Darus Salam menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial menyambut tahun baru Hijriah, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian sosial. "Di situasi saat ini, kehadiran lembaga sosial dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat sangat penting," ujarnya.

Menurut Sekda, penyelenggaraan sunatan massal memiliki nilai ibadah sekaligus fungsi sosial karena membantu masyarakat memenuhi kewajiban syariat dengan biaya yang lebih ringan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan gratis menjadi langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kondisi kesehatan.

Ia menambahkan bahwa semangat hi-

jarah yang melekat pada peringatan 1 Muharram seharusnya dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, termasuk memperkuat solidaritas dan kepedulian antarsesama. "Kegiatan ini bermakna sebagai ibadah sosial sekaligus bagian dari kepedulian nyata kepada sesama," katanya.

Sekda juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang telah disediakan. Menurutnya, deteksi dini terhadap berbagai penyakit merupakan langkah penting untuk mencegah risiko kesehatan yang lebih serius di masa mendatang. "Kesehatan adalah aset paling berharga yang kita miliki. Deteksi dini akan sangat membantu upaya pencegahan," tutur La Ode Darus Salam.

Suasana penuh keakraban tampak ketika Sekda menyapa anak-anak peserta khitan massal. Ia memberikan motivasi agar mereka tidak merasa takut menjalani proses tersebut dan tetap bersemangat mengikuti arahan tenaga medis selama masa pemulihan.

"Kepada anak-anakku yang dikhitan, jangan takut ya. Anggap saja ini seperti digigit semut. Setelah itu, insya Allah kalian menjadi anak yang kuat, cerdas, pemberani, dan lebih sehat," ucapnya di hadapan para peserta dan orang tua yang mendampingi.

Pemerintah Kota Baubau menilai kegiatan tersebut juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat karena mampu mengurangi beban biaya keluarga dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan maupun pelaksanaan khitan bagi anak-anak mereka.

Di akhir kegiatan pembukaan, Sekda menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Kota Baubau, Bagian

Kesra Setda Kota Baubau, dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam yang telah memanfaatkan masa libur sekolah untuk menyelenggarakan aktivitas sosial yang produktif. Ia berharap pola kolaborasi serupa dapat diperluas oleh organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, maupun instansi pemerintah lainnya.

Secara historis, penanggalan Hijriah mulai digunakan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 638 Masehi dengan menjadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah sebagai titik awal kalender Islam. Sejak saat itu, 1 Muharram adalah aset paling berharga yang kita miliki. Deteksi dini akan sangat membantu upaya pencegahan," tutur La Ode Darus Salam.

Di Indonesia, peringatan Tahun Baru Islam tidak hanya diisi dengan kegiatan keagamaan seperti doa bersama dan pawai obor, tetapi juga berkembang menjadi wadah pelaksanaan bakti sosial, santunan, donor darah, pelayanan kesehatan, hingga sunatan massal yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga zakat, organisasi keagamaan, dan komunitas masyarakat.

Praktik pelayanan kesehatan berbasis kegiatan sosial pada momentum keagamaan juga dikenal di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk melalui penyelenggaraan layanan medis gratis dan aksi kemanusiaan yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Inisiatif seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Baubau mencerminkan pendekatan yang menggabungkan nilai spiritual dengan kepedulian sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)